ANALISIS KRITIS TERHADAP FIKIH PERCERAIAN RESPONSIF GENDER: STUDI PENERAPAN KAIDAH MAQĀSĪD AL-SYARĪAH

Holilur Rohman

Dosen UIN Sunan
Ampel Surabaya,
Indonesia
elrahman10@gmail.com

Abstract: *This study discusses the application of maqāṣid al-sharīah principles in the gender-responsive marriage Jurisprudence. The focus of this research is: how the principles of maqāṣid al-sharīah could be used as a foundation and approach of Ijtihad? How is the application of maqāṣid al-sharīah principles in the issue of gender-responsive marriage Jurisprudence? This research is a qualitative research, which is in the form of descriptive-analytical library research. The approach used is the philosophical approach. In this study it was found that there are four rules of maqāṣid al-sharīah which are used as the basis for jihad. These norms was then applied in a gender-responsive divorce Jurisprudence. This research concludes, that the holder of divorce rights is male, but the divorce can be pronounced based on the court's decision so that the results are more objective. In addition, divorce must be done for certain reasons, such as the cause of a constant dispute that cannot be resolved. Therefore, divorce without cause and without dialogue with his wife, is prohibited because it gives the effect of harm especially to his wife and children.*

Keywords: *marriage Jurisprudence, divorce Jurisprudence, and maqāṣid al-sharīah principles*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang penerapan kaidah *maqāṣid al-sharīah* dalam fikih pernikahan responsif gender. Fokus penelitian ini adalah: bagaimana kaidah-kaidah *maqāṣid al-sharīah* yang bisa dijadikan landasan dan pendekatan Ijtihad? Bagaimana penerapan kaidah-kaidah *maqāṣid al-sharīah* dalam persoalan fikih pernikahan responsive gender? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berupa

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 10, Nomor 01, Juni 2020; ISSN:2089-7480

penelitian pustaka yang bersifat *deskriptif-analitis*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat. Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa ada empat kaidah *maqāṣid al-sharīah* yang dijadikan landasan untuk berijtihad. Kaidah-kaidah inilah yang selanjutnya diterapkan dalam fikih perceraian responsive gender. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pemilik hak talak adalah laki-laki, akan tetapi talak tersebut bisa diucapkan berdasar putusan pengadilan agar hasilnya lebih objektif. Selain itu, talak haruslah dilakukan karena sebab-sebab tertentu, seperti sebab perselisihan terus menerus yang tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu, perceraian tanpa sebab dan tanpa ada dialog dengan istri, hukumnya haram karena memberi dampak kemudharatan khususnya kepada istri dan anak.

Kata Kunci: Fikih Pernikahan, Fikih Perceraian, Kaidah *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

Pendahuluan

Pada dasarnya, sifat dasar fikih adalah elastis dan fleksibel karena merupakan hasil dialektika antara teks otoritatif dan realitas kemanusiaan, serta dialektika antara wahyu dan akal yang harus dibaca secara cerdas. Kesalahan besar -mungkin juga ketidaktahuan- yang pernah dan sedang terjadi dalam rentang perjalanan sejarah fikih adalah mengubah watak elastis dan dialogis fikih menjadi corak kaku dan monologis. Fikih seringkali dipahami sebagai produk yang sudah final dan berlaku universal. Penyebab di antaranya adalah kekurangtahuan tentang *maqāṣid al-sharīah*. Karena itulah, al-Qarafi (W.684 H) sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili (W.1435 H) menyatakan: “kemandekan pada teks-teks literatur selamanya merupakan kesesatan dalam beragama dan suatu kebodohan dalam memahami *maqāṣid* ulama muslimin dan para salaf masa lalu.”¹

¹ Wahbah al-Zuhaili tidak menjelaskan secara spesifik tentang siapa saja yang menganggap fikih sebagai produk final dan berlaku universal. Penjelasan di atas merupakan pengembangan dari pembahasan salah satu kaidah fikih “

Salah satu isu kontemporer yang sering mengundang polemik dan diskusi panjang adalah tentang fikih pernikahan. Ada banyak aspek fikih pernikahan yang erat kaitannya dengan isu gender, di antaranya adalah persoalan perceraian. Dalam berbagai kitab fikih dijelaskan, bahwa hak bercerai sepenuhnya milik suami. Suami bisa menjatuhkan talak sesuai keinginannya bahkan tanpa ada alasan apapun.²

Bahkan dalam hadis dijelaskan, bahwa baik serius ataupun bercanda, talak yang diucapkan suami tetap terjadi. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Abu Hurairah:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: (1) nikah, (2) talak, dan (3) rujuk”.³

Melihat kasus fikih di atas, pihak istri dianggap mendapatkan kerugian dan ketidakadilan. Jika diterapkan pada masa sekarang, fikih pernikahan klasik dianggap tidak responsif gender. Suami dan istri yang seharusnya mempunyai posisi yang sama dan adil dalam keluarga, ternyata pada prakteknya, istri

tagayyur al-aḥkām bi tagayyur al-Amkinah wa al-Azminah”. Menurut hemat saya (penulis), anggapan itu ditujukan kepada para ahli fikih pada masa taqlid, di mana mereka tidak lagi menciptakan produk fikih baru, akan tetapi lebih pada mengembangkan produk fikih lama dengan cara mensyarah dan juga meringkas. Alasannya, pintu ijtihad sudah tertutup dan cukuplah mempraktekkan fikih melalui produk fikih yang sudah ada. Lihat Wahbah Zuhayli, *Tajdīd al-Fikih al-Islāmi*, (Beirut: Darl al-Fikr, 2002), 108 - 181.

² Muhyiddin al-Nawawi, *Kitāb al-Majmu’ Sharh al-Muhadhdhab li al-Shirazī*, juz 18 (Maktabah al-Isrsyad, Jeddah, tt), 203. Menurut Sayyid Sabiq, ada beberapa alasan hak talak ada pada pihak suami. Di antaranya adalah suami dianggap lebih bisa menjaga hubungan pernikahan, ditambah lagi karena suami adalah pihak yang memberi nafkah. Selain itu, suami dianggap lebih sabar dalam menghadapi problematika dalam rumah tangga. Oleh karena itu jika terjadi persoalan dalam rumah tangga, suami dianggap mampu bersabar dan bisa menahan emosi sehingga bisa tetap berfikiran jernih dan tidak terburu-buru untuk mentalak. Hal ini berbeda dengan kondisi perempuan yang dianggap lebih cepat marah dan sedikit pertimbangan ketika terjadi persoalan sehingga bisa jadi dia lebih memutuskan talak dari pada menjaga pernikahan. Lihat Al-Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1995), Juz 2, 282.

³ Muhyiddin al-Nawawi, *Kitāb al-Majmu’* ., 203

sering menjadi korban ketidakadilan dan kesewenang-wenangan suami.

Kaidah-kaidah *maqāṣid al-sharīah* bisa menjadi pendekatan untuk menggagas fikih pernikahan responsive gender, terutama pada problematika perceraian. Selain itu, kaidah *maqāṣid al-sharīah* bisa menjadi landasan ijtihad untuk menghadirkan aturan-aturan fikih, terutama mengenai hak talak, syarat talak, dan hukum talak sehingga bisa menjaga pernikahan suami istri tetap utuh dan membawa keadilan dalam hubungan suami istri selama menjalani bahtera rumah tangga. Karena pada hakikatnya, setiap aturan fikih dan syariat haruslah bermuara kepada kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan sepihak atau kemaslahatan individual.

Untuk menelaah persoalan di atas, pembahasan dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis kaidah-kaidah seputar *maqāṣid al-sharīah*, kemudian kaidah-kaidah tersebut diterapkan dalam diskursus fikih perceraian. Menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, kajian ini berusaha mendeskripsikan fikih perceraian yang berkaitan dengan pemilik hak cerai, syarat bercerai, dan hukum bercerai. Data yang diperoleh dianalisis dan dikaji menggunakan kaidah-kaidah *maqāṣid al-sharīah* untuk memperdalam analisis terhadap pemilik hak cerai, syarat bercerai, dan hukum bercerai yang responsif gender. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat dan gender. Pendekatan filsafat artinya memahami teks fikih tidak sekedar membacanya secara tekstual saja, akan tetapi mencari makna sedalam-dalamnya dari teks agar ditemukan maksud dan tujuan yang terkandung dalamnya. Sedangkan pendekatan gender berarti menggunakan teori ataupun konsep gender untuk melihat sejauh mana fikih perceraian menerapkan nilai-nilai keadilan gender.

Kaidah *Maqāṣid al-Sharīah*

Kaidah *maqāṣid al-sharīah* merupakan kumpulan prinsip yang didasarkan pada kajian *maqāṣid al-sharīah*. Berbeda dengan kaidah fikih dan usul fikih, kaidah *maqāṣid al-sharīah* merupakan salah satu cabang keilmuan baru. Jika kaidah fikih dan usul fikih telah lama dikenal dalam diskursus pemikiran

hukum Islam, maka kaidah *maqāṣid al-sharīah* relatif baru dikenal bersamaan dengan dengan tumbuh kembangnya ilmu *maqāṣid al-sharīah*. Tidak banyak kitab yang fokus membahas tentang kaidah *maqāṣid al-sharīah* secara spesifik.

Salah satu kitab yang sistematis dan detail membahas tentang kaidah *maqāṣid al-sharīah* adalah kitab *al-Fikru al-Maqāṣidī Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu* karya Ahmad al-Raisuni. Menurut al-Raisuni, kaidah *maqāṣid al-sharīah* ada empat, yaitu:

1. Kaidah pertama: setiap aturan syariah pasti disandarkan pada tujuan (*maqāṣid*), dan kemaslahatannya⁴

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap aturan dalam syariah yang diturunkan Allah pasti mengandung *maqāṣid* dan kemaslahatan. Setiap ayat yang berkait dan dengan hukum Islam pasti ada *illat* dan *maqāṣidnya*. Begitu juga setiap hadis yang disampaikan Rasulullah melalui perkataan, tindakan, dan ketetapanannya pasti ada *maqāṣid* dan kemaslahatannya.

2. Kaidah kedua: Pencarian *maqāṣid* harus berdasarkan petunjuk dalil

Kaidah ini merupakan kelanjutan dari kaidah sebelumnya. Jika kaidah pertama menegaskan, bahwa setiap aturan syariah pasti ada maksud dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, maka kaidah kedua ini menjelaskan, bahwa maksud dan kemaslahatan yang terkandung dalam syariah harus dicari melalui dalil dan petunjuk yang benar, tidak hanya berdasarkan akal dan keinginan hawa nafsu, serta tidak mengandalkan sangkaan dan angan-angan yang tidak jelas dan tidak terukur.⁵

⁴ Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqāṣidī Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu* (Dar al-Baida': Ribat: 1999), 39.

⁵ *Ibid.*, 60.

Masālik al-ta'līl menurut al-Raisuni ada lima, yaitu: Ijma',⁶ *Naş*,⁷ *Isyarah*,⁸ *Munāsabah*,⁹ dan Penelitian (*istiqrā'*).¹⁰

3. Kaidah ketiga: Hierarki *Maşlahah* dan *Mafsadah*

Kaidah ini menegaskan, bahwa tujuan syariat mempunyai hierarki yang antara satu tingkat berbeda dengan tingkat lainnya. Kemaslahatan dan kemafsadatan memiliki tingkatan yang berbeda dalam dalam berbagai aspek. Oleh karena itu banyak ulama' menjelaskan tentang macam-macam kemaslahatan dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan macam-macam yang berbeda. Al-Raisuni menjelaskan, bahwa ulama' terdahulu yang mempunyai perhatian serius terhadap hierarki ini adalah al-Imam 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam dalam kitab *Qawā'id al-Aḥkām fi Maşāliḥ al-Anām*, lalu dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Syihabuddin al-Qarafi dalam kitab *al-Furūq*.¹¹

4. Kaidah keempat: Pembedaan antara *Al-Maqāsid* dan *al-Wasāil*

Al-Raisuni membuat salah satu kaidah *maqāsid* yang pada prinsipnya menekankan pentingnya pembedaan antara *al-maqāsid* dan *al-wasāil*. Kaidah ke empat dari

⁶ Yaitu kesepakatan ulama' mengenai `illat hukum tertentu, seperti kesepakatan ulama' tentang "masa kecil / tidak dewasa" sebagai `illat (*maqāsid*) dari perwalian harta seorang anak. Ibid., 64.

⁷Yaitu teks al-qur'an dan hadis menjelaskan secara konkrit maksud yang terkandung di dalam suatu hukum. Lihat Al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqāsidī*, 64.

⁸ Yaitu penjelasan al-qur'an dan sunnah mengenai `illat (*maqāsid*) suatu hukum dengan tidak menyebutkannya secara langsung atau tidak dijelaskan secara konkrit bahwa suatu hal adalah `illat hukum tertentu. Ibid.

⁹ *Munāsabah* adalah adanya hubungan yang jelas dan logis antara suatu hukum dan suatu perbuatan. Ibid.

¹⁰ Yaitu penelitian induktif dengan cara mencari makna dan maksud secara spesifik dari masing-masing hukum lalu digeneralisir maksud umum dari maksud-maksud spesifik tersebut. Ibid., 59-67. Istilah *istiqrā'* dalam pencarian `illat juga pernah dijelaskan oleh shatibi dalam kitab *al-Muwafāqāt*. begitu juga istilah *isitiqrā'* ini secara tegas dikatakan oleh ibnu 'Ashur bahwa *isitiqrā'* adalah cara pertama dan paling utama untuk mengungkap illat hukum. Lihat Muhammad al-Tahir Bin Ashur, *Maqāsid al-Shariah*, (Tunisia : Sharīkah Al-Tunisia li al-Tauzi',tt), 189.

¹¹ Ahmad al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqāsidī*,70.

empat kaidah *maqāṣid al-sharīah* tawaran al-Raisuni adalah التمييز بين المقاصد والوسائل (pembedaan antara tujuan dan sarana).¹² Kaidah ini menjelaskan bahwa ada perbedaan antara maksud syari'ah dan sarana yang mengantarkan pada maksud tersebut. Sarana itulah yang disebut *wasāil*. *Wasāil* adalah sarana yang mengantarkan terealisasinya maksud syari'ah.¹³

Analisis Kritis Terhadap Fikih Perceraian Perspektif Kaidah *Maqāṣid Al-Sharīah*

Pemilik Hak Talak

Ada dua bentuk ketidakadilan gender yang terjadi pada pemilik hak talak, yaitu stereotype dan subordinasi. Kedua bentuk inilah yang menjadikan hak talak sepenuhnya menjadi hak laki-laki.¹⁴ Seorang suami dianggap paling berhak memiliki hak talak karena lebih sabar, lebih jernih pemikirannya, dan karena menjadi pemimpin keluarga.¹⁵ Adanya hak tunggal pemilik talak ini bisa berdampak pada ke-otoriter-an suami jika digunakan dengan cara tidak baik dan bahkan bisa menghasilkan kezaliman kepada istri jika talak diucapkan oleh suami tanpa alasan dan tanpa sebab apapun.¹⁶

Jika dilihat dalam dari perspektif *maqāṣid al-sharīah*, lebih khusus lagi persoalan perceraian, maka seharusnya peluang yang akan mengantarkan pada perilaku sewenang-wenang dan kezaliman harus dicegah sedini mungkin agar kemaslahatan suami istri bisa terealisasi. Perspektif *maqāṣid al-sharīah* yang

¹² Ibid., 77.

¹³ Kata *wasāil* juga pernah dibahas oleh Syatibi dengan menggunakan bahasa *mukmilah*, yaitu pelengkap dari *maqāṣid* pada tingkat *ḍarūriyyah*, *ḥajiyah*, dan *taḥsiniyyah*. Pelengkap inilah yang mengantarkan terealisasinya *maqāṣid*. Lihat Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 219.

¹⁴ Muhyiddin al-Nawawi, *Kitāb al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab li al-Shirazi*, juz 18 (Maktabah al-Isrsyad: Jeddah, tt), 203.

¹⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1995), 282.

¹⁶ Mohsi, 'Konstruksi Hukum Perceraian Islam dalam Fiqh Indonesia', *Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman*. Vol.1 No.2 Desember 2015 : ISSN 2442-8566, 241

dimaksud mencakup *al-maqāṣid al-‘āmmah*, *al-maqāṣid al-khaṣṣah*, dan *al-maqāṣid al-juziyyah*.

Salah satu point dalam *al-maqāṣid al-‘āmmah* adalah syariat Islam bertujuan untuk menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratannya.¹⁷ Jika ditarik pada persoalan fikih perceraian, maka tujuan ini menjadi payung besar bagi aturan-aturan fikih perceraian. Setiap aturan perceraian haruslah menarik kemanfaatan dan menolak kemafsadatan dan harus menutup semua celah yang bisa menghancurkan tujuan umum ini, baik menghancurkan dengan cara menghilangkan kemafsadatan atau dengan menarik kemudaratannya.

Selain tujuan tersebut, salah satu tujuan pensyariaan adalah memberikan keadilan bagi siapapun yang dikenai khitab pensyariaan, baik laki-laki ataupun perempuan.¹⁸ Berdasar tujuan ini, setiap aturan perceraian harus berdasar dan bermuara pada prinsip keadilan dan tidak boleh memberikan aturan timpang yang merugikan laki-laki dan perempuan.

Jika melihat kedua tujuan tersebut, maka kepemilikan hak talak hanya di tangan laki-laki, sedangkan perempuan sama sekali tidak punya akses dan kesempatan untuk menolak, menerima, ataupun berkomentar, maka jelaslah aturan ini bisa merusak tujuan umum dari syariat Islam, yaitu menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratannya, serta merusak tujuan keadilan. Ketika istri sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk berargumen atau berkomentar atas talak yang dijatuhkan suami, maka aturan tersebut sangatlah tidak adil dan memberikan kemudaratannya bagi perempuan.

Ketidakadilan ini seharusnya bisa hilang dan menjadi adil gender, ketika istri mempunyai kesempatan untuk memberikan pembelaan dan penjelasan terkait dengan peristiwa ucapan talak. Kalaupun hak talak tersebut tetap menjadi milik suami, akan tetapi jika istri diberikan kesempatan berbicara untuk

¹⁷ Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah, *‘Ilmu Maqāṣid al-Sharī‘ah* (Riyad: Maktabah al-‘Abikan, 2010), 194.

¹⁸ Muhammad Tahir Bin ‘Ashur (*Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Urdun: Dār al-Nafāis, 2001), 317.

berdiskusi dan berargumen tentang alasan dan sebab talak diucapkan, serta punya kesempatan untuk memilih apakah menerima atau menolak perceraian dengan argumen yang rasional, maka keadilan gender berbasis *maqāṣid al-sharīah* akan terealisasi.

Sedangkan kemudharatan yang akan dialami istri, berkaitan dengan posisi istri yang termarginalkan dari hak talak sehingga dia sama sekali tidak punya hak apapun untuk menolak atau memberi pembelaan. Kondisi seperti ini sangat rentan membawa kemudharatan pada istri, baik ketika masih dalam ikatan pernikahan atau setelah terjadi perceraian. Ketika dalam pernikahan, seorang istri mengalami ketidakpastian dan rasa khawatir jika suatu saat suaminya secara tiba-tiba mencerainya tanpa alasan yang jelas, padahal si istri telah berusaha menjadi istri salihah dan melakukan apapun yang suami senangi.

Sedangkan kemudharatan yang didapatkan setelah perceraian berkaitan dengan aspek mental dan ekonomi. Dalam kajian *maqāṣid* dikenal istilah *hifz al-aql* dan *hifz al-māl*.¹⁹ Berkaitan dengan *hifz al-aql*, ada beberapa kasus di mana ketika istri dicerai karena alasan yang tidak memihak istri, akhirnya istri mengalami stress dan gangguan kejiwaan, bahkan ada juga yang nekat melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan pidana.

Sedangkan kemudharatan yang berdampak pada aspek ekonomi terjadi terutama jika istri tidak bekerja atau tidak punya pengalaman bekerja selama menikah. Kemudharatan menjadi nyata ketika perceraian tersebut diucapkan dan secara otomatis pernikahan berakhir sedangkan istri tidak punya pengalaman bekerja, atau tidak tahu harus berbuat apa untuk menghidupi anaknya, jika dia punya anak. Pada faktanya, istrinya yang dicerai akan merasa malu pulang kepada keluarga besarnya, karena akan menjadi beban keluarga. Sedangkan jika tidak kembali ke keluarganya, dia akan mengalami kesulitan ekonomi.

¹⁹ Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin rabi'ah, *Ilmu Maqāṣid al-Sharī'ah*, 194.

Berdasar kajian di atas, seharusnya ketidakadilan gender dan kemudharatan yang akan dialami suami atau istri tidak akan terjadi terutama pada masa sekarang, jika ada sistem perceraian yang bisa menghadirkan keadilan gender dan meminimalisir kemudharatan. Solusi yang ditawarkan dalam kajian *maqāsid* bukan berarti mengganti pemilik hak talak menjadi sepenuhnya milik istri, karena hal tersebut tidak jauh beda dengan sebelumnya dan sama saja tidak adil gender, serta akan membawa kemudharatan bagi suami istri. Solusinya juga bukan dengan memberikan keduanya hak yang sama untuk menceraikan, karena bisa jadi hal tersebut akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dengan berlomba-lomba mengucapkan kata cerai.

Maka solusi yang menjadi tawaran agar terealisasi keadilan gender dan menghilangkan kemudharatan adalah sistem perceraian harus melibatkan suami istri dan pihak ketiga, yaitu seorang pengadil atau hakim yang akan melihat secara objektif fakta persidangan sehingga dia bisa menyimpulkan apakah pernikahan suami istri seharusnya tetap dipertahankan atau seharusnya diakhiri.²⁰ Adanya pengadil tersebut menjadi jalan tengah agar keadilan gender bisa terealisasi, di mana suami dan istri punya hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan cerai, akan tetapi keduanya harus bisa menguatkan alasan perceraian tersebut dan bisa meyakinkan hakim bahwa perceraianlah solusi terakhir agar bisa terhindar dari kemudharatan. Ketika hakim telah melihat alasan dan fakta di persidangan berdasarkan keterangan suami istri dan juga saksi, maka hakim secara objektif akan memutuskan apakah harus mempertahankan rumah tangga atau justru harus diceraikan. Hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 115: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Syarat Talak

²⁰ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, 'Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam hukum Perkawinan Islam', *SAWWA* - Volume 8, Nomor 2, April 2013, 383.

Syarat dan rukun talak merupakan keharusan yang harus dilengkapi, agar talak bisa dianggap sah. Dalam kajian usul fikih, syarat dan rukun masuk dalam kajian hukum *wad'i*, yaitu adanya suatu hukum tergantung pada sesuatu yang lain. Berdasar kajian *maqāṣid al-sharīah*, syarat dan rukun perceraian adalah *wasīlah* (perantara) yang mengantarkan pada *maqāṣid al-sharīah* perceraian, yaitu menghilangkan kemudharatan dan memberikan kemaslahatan bagi suami istri.

Syarat yang berkaitan dengan istri ada tiga, yaitu Istri merupakan istri sah suami dan tetap berada dalam penguasaan suami, istri bukanlah istri yang telah *diwaṭi'* sebab *milk al-yamīn*, dan istri adalah istri sah dengan akad pernikahan yang sah.²¹ Syarat sahnya talak yang berkaitan dengan sighat talak ada dua, yaitu harus berupa ucapan yang menunjukkan talak, baik secara *ṣarīh* (jelas)²², dan harus jelas maksudnya dan ditujukan kepada orang tertentu²³

Sebagai contoh syarat perceraian adalah suami yang mentalak harus berdasar kemauan sendiri (tidak terpaksa). Syarat ini adalah *wasīlah* agar tujuan perceraian bisa terealisasi. Oleh karena itu, jika suami menceraikan istrinya karena ada paksaan dari luar, maka perceraian tidak sah, karena tujuan perceraian tidak terealisasi. Suami yang menceraikan istrinya karena dipaksa bisa jadi dia masih mencintai dan menyayangi istri dan anak-anaknya, dan sama sekali tidak ada keinginan untuk bercerai. Jika perceraian disahkan, maka perceraian tersebut tidak membawa kemaslahatan bagi suami istri, justru bisa menyebabkan kemudharatan bagi keduanya.

Prinsip *wasīlah* sebagaimana dijelaskan oleh al-Raisuni adalah:

1. Jika *maqāṣid* bersifat permanen dan tidak bisa berubah, maka *wasā'il* mempunyai sifat temporal dan berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi.²⁴

²¹ 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fikih 'Ala al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2014), 254.

²² Ibid, 257.

²³ Ibid.

²⁴ Al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqasidi*, 83.

2. Umat Islam harus mempertahankan usahanya untuk merealisasikan *maqāṣid sharī'ah*. Sebaliknya, dalam memperlakukan *wasāil* sebagai sarana *maqāṣid*, umat Islam dituntut untuk mempermudahnya dan tidak boleh mempersulit sehingga *wasāil* tersebut bisa merealisasikan *maqāṣid* yang dituju. Umat Islam tidak boleh mempersempit ruang gerak *wasāil* apalagi jika menghalangi terealisasinya *maqāṣid*.²⁵
3. Ada peluang bagi *wasīlah* lain untuk menggantikan *wasīlah* asal jika *wasīlah* lain tersebut bisa menggantikan posisi *wasīlah* asal, atau bahkan lebih cocok dan kontributif untuk merealisasikan *maqāṣid*. Oleh karena itu, *wasīlah* asal bisa diganti atau bahkan harus diganti dengan *wasīlah* lain jika lebih prospektif untuk merealisasikan *maqāṣid*, atau bisa jadi ditambah *wasīlah* baru yang tidak ada sebelumnya dengan harapan bisa memperkuat tercapainya *maqāṣid*.²⁶

Syarat dan rukun perceraian yang telah dibahas oleh ulama dalam fikih perceraian, menurut hemat penulis tidak perlu dikurangi dan harus dipertahankan selama tetap memperkuat tercapainya *maqāṣid al-sharī'ah*. Akan tetapi, yang perlu dipertegas selain syarat dan rukun yang telah disebutkan adalah, pentingnya penambahan *wasīlah* baru berupa "syarat lain" untuk menjamin tujuan pernikahan bisa terealisasi. Syarat lain tersebut berkaitan dengan alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar mengajukan perceraian, dan syarat yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara bercerai.

Syarat berupa alasan dan sebab sebagai dasar bercerai merupakan hal penting dalam fikih perceraian agar tujuan syariat secara umum berupa keadilan serta tujuan pernikahan secara khusus berupa menarik kemaslahatan serta menolak kemudaratatan bagi suami istri bisa terealisasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak ada syarat dalam fikih perceraian berupa sebab dan alasan yang bisa dijadikan dasar mengucapkan talak. Konsekuensinya adalah suami yang

²⁵ Ibid., 86.

²⁶ Ibid., 87.

mengucapkan talak dalam kondisi apapun, tanpa sebab apapun, dan tanpa alasan yang jelas hukumnya tetap sah dan talaknya tetap terjadi. Bahkan dijelaskan, bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan bergurau tetap dianggap sah.²⁷

Jika dikaji dalam kajian *maqāsid al-sharīah*, jelas kondisi tersebut bertentangan tujuan syariah secara umum dan tujuan fikih perceraian secara khusus. Istri akan mengalami kemudharatan dan ketidakadilan ketika dia harus dicerai suaminya tanpa bisa memberikan pembelaan dan tidak diberi ruang berdiskusi dengan suaminya. Bisa jadi istri tersebut sangat mencintai suaminya, setia pada suaminya, dan berusaha melakukan yang terbaik untuk suaminya. Akan tetapi cinta dan kesetiiaannya bisa hancur hanya dengan satu ucapan talak suami tanpa ada sebab dan alasan yang jelas, bahkan bisa jadi dalam keadaan bergurau. Pada kondisi ini istri sangat dirugikan dan mendapatkan kemudharatan dalam berbagai aspek, terutama aspek psikologis (*hifz al-aql*), aspek ekonomi (*hifz al-māl*), dan aspek perawatan anak (*hifz al-nasl*).

Oleh karena itu, adanya *wasīlah* baru dengan adanya penambahan syarat perceraian berupa "sebab dan alasan bercerai" bisa meminimalisir kemudharatan bagi seorang istri dan suami sekaligus. Suami yang mentalak istrinya tanpa sebab dan alasan yang jelas, apalagi diucapkan dalam keadaan bergurau, seharusnya tidak sah karena tidak akan menghasilkan kemaslahatan, justru menyebabkan kemudharatan.

Berkaitan dengan sebab dan alasan yang bisa dijadikan dasar perceraian, al-Jurjawi menjelaskan dua hal yang bisa dijadikan alasan cerai, yaitu karena sebab mandul dan karena sebab terjadinya perselisihan terus menerus yang tidak bisa diselesaikan.²⁸ Kedua alasan ini bisa dijadikan dasar untuk pengajuan perceraian, tentunya setelah diajukan dan diputuskan oleh hakim.

²⁷ Muhyiddin al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Sharḥ al-Muhadhdhab li al-Shirazī*, juz 18 (Jeddah: Maktabah al-Isrsyad, tt), 210.

²⁸ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Ḥikmah al-Tashrī' wa Walsafatuhu*, juz 2 (Beirut; Dar al-Fikr, 1997), 36-37.

Selain alasan tersebut, ada alasan dan sebab lain yang bisa dijadikan dasar perceraian sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁹

Hukum Talak

Akar ketidakadilan gender pada problematika hukum talak adalah tentang subornasi dan *violence* terhadap perempuan. Suami yang mentalak istri tanpa sebab dan tanpa alasan dalam kajian fikih perceraian hukumnya makruh.³⁰ Artinya, suami yang menceraikan istri tanpa alasan dianggap

²⁹ Imam Kamaluddin, Perceraian Melalui Media Elektronik (Sms) dalam Prespektif Hukum Positif dan Fiqh Islam, Ijtihad, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 13 Nomor 1, April 2019, 4.

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fikih 'Ala al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 4, 264.

tidak berdosa, padahal dampak dari perceraian tersebut bisa memberikan kemudahan yang luar biasa bagi istri, dan juga kepada anaknya.

Hal ini berbeda dengan mentalak istri ketika sedang haid, atau mentalak istri dalam keadaan suci lalu melakukan hubungan seksual, maka hukumnya adalah haram karena masuk dalam kategori talak bid'i.³¹ Menurut an-Nawawi, hikmah pelarangan talak pada waktu haram ini karena jika dilakukan akan membuat perempuan semakin sulit karena akan memperpanjang masa iddah. Jika mentalak istri dalam keadaan suci dan sudah pernah *dijima'* sebelum ada kepastian tentang kehamilannya, dia akan menyesal jika ketika diceraai ternyata ada janin di rahim istrinya. Oleh karena itu talak pada waktu tersebut hukumnya haram karena ada kekhawatiran jika ketika diceraai ternyata istrinya dalam keadaan hamil. Hal tersebut juga membuat istri mengalami ketidakjelasan apakah iddahnya akan dihitung karena kehamilan atau dengan hitungan *quru'*.³²

Jika dilihat dari dua keadaan di atas, seharusnya dua macam talak tersebut (talak tanpa sebab dan talak di waktu haram) hukumnya haram karena mengantarkan pada kemudahan, khususnya bagi pihak istri. Jika mentalak istri pada waktu haid diharamkan karena akan memberikan kemudahan berupa perpanjangan masa iddah, maka talak tanpa sebab seharusnya juga diharamkan karena akan mengantarkan kepada kemudahan terutama yang berkaitan dengan psikologi dan ekonomi istri dan anak (*hifz al-aql dan hifz al-māl*). Seorang istri yang diceraikan tanpa ada sebab dan tanpa ada diskusi dengan istri tentu memberikan pukulan berat bagi istri sehingga bisa membahayakan psikologisnya sekaligus memberikan istri kesulitan ekonomi.

Oleh karena itu, penulis sepakat dengan pendapat al-Jaziri yang mengaitkan keharaman talak dengan sebab yang melatarbelakangi talak. Menurut al-Jaziri, hukum talak menjadi

³¹ Muhyiddin al-Nawawi, *Kitāb al-Majmu' Sharh al-Muhazzab li al-Shirazī*, juz 18, 216.

³² Ibid.

haram jika menyebabkan salah satu kedua belah pihak (suami atau istri) jatuh pada keharaman seperti perzinahan, makan makanan haram, atau bisa menyebabkan kezaliman dan kesengsaraan kepada istri.³³ Bahkan menurut al-Jaziri, suami dilarang mentalak istrinya tanpa sebab walaupun dilakukan pada waktu-waktu yang diboleh untuk mentalak (talak *sunni*).³⁴

Pendapat keharaman talak tanpa sebab ini juga dipilih oleh Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Ramadhan Syahmedi Siregar. Menurut sayyid Saybiq, alasan keharaman talak tanpa ada keperluan dan tanpa ada sebab karena menyebabkan kemudharatan suami dan istri sekaligus.³⁵

Talak tanpa sebab ini diharamkan karena bisa merusak *maqāsid al-sharīah*, baik yang umum (*‘ammah*), khusus (*khaṣṣah*), maupun yang spesifik (*juz’ī*). Berkaitan dengan *al-maqāsid al-‘ammah*, setidaknya ada dua tujuan syariah yang dirusak oleh perceraian tanpa sebab dan tanpa ada diskusi dengan istri. Penjelasan sebagai berikut:

1. *Al-Daruriyyah al-Khamsah*

Perceraian tanpa sebab dan tanpa ada diskusi dengan istri, bisa merusak lima hal yang dijaga oleh syariat Islam. Berdasar lima hal yang wajib tersebut, maka fikih perceraian tidak boleh membuat suami istri dan anak mengalami guncangan akal yang luar biasa sehingga membuatnya stress dan akalnya terganggu. Oleh karena itu, hukum perceraian tanpa sebab dan tidak ada ruang dialog di dalamnya adalah haram, karena menyebabkan stress dan akalnya terganggu. Bahkan keharaman ini semakin kuat jika terganggunya akal si istri pasca perceraian, bisa mengancam nyawanya dan juga anak-anaknya. Perceraian haruslah dilakukan dengan dengan cara yang terbaik dari semua prosesnya sehingga keduanya merasakan, bahwa perceraian tersebut merupakan solusi terahir yang harus ditempuh dari pada

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fikih ‘Ala al-Madzāhib al-Arba’ah*, Juz 4, 263.

³⁴ Ibid, 278.

³⁵ Ramadhan Syahmedi Siregar, Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/index/indexhttp>, 2017, 25.

melanjutkan pernikahan akan tetapi terus terjadi persielisihan.

Aturan perceraian tidak boleh menyebabkan rusaknya keturunan dari masing-masing kedua belah pihak. Keturunan yang dimaksud bisa jadi berupa kesempatan untuk melahirkan anak bagi masing-masing keduanya, bisa juga yang dimaksud adalah menjaga anak yang menjadi hasil dari pernikahan keduanya. Oleh karena itu perceraian tanpa sebab dan tanpa diskusi diharamkan karena akan merusak masa depan anak.

Aturan perceraian haruslah menjaga harta suami dan anak. Oleh karena itu perceraian tanpa sebab dan tanpa diskusi diharamkan karena akan merugikan hak finansial terutama bagi istri dan anak-anaknya. Baik suami ataupun istri harus mendapatkan hak finansial yang seimbang dan proporsional. Bagi istri yang ketika menikah tidak bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga, maka hak finansial istri harus benar-benar diperhatikan tidak hanya dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka Panjang.

2. *Al-Musāwah* (Kesetaraan dan keadilan)

Perceraian tanpa sebab dan tanpa ada ruang dialog dengan istri, hukumnya haram karena merusak tujuan syariat berupa kesetaraan dan keadilan. Pada talak tersebut sangat jelas istri temarginalkan, karena tidak diberi ruang dialog seputar perceraianya dan tidak diberi kesempatan sekali untuk membela dirinya sendiri dan anaknya. Talak tanpa sebab sangat menghancurkan bangunan keadilan yang menjadi prinsip dan tujuan syariat Islam.

Jika dilihat dari prinsip pernikahan, maka sesungguhnya akad pernikahan merupakan kesepakatan antara suami istri untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.³⁶ Kesepakatan antara suami istri ini harus dilandasi rasa saling rela dan tidak boleh ada unsur paksaan di dalamnya. Oleh karena itu, akad pernikahan yang dilakukan secara terpaksa hukumnya tidak sah. Jika akad pernikahan

³⁶ Jamaluddin 'Atiyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid Shari'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 150.

mengharuskan adanya kerelaan antara kedua belah pihak agar prinsip keadilan bisa terwujud, maka prinsip saling rela ini juga harus ada pada perceraian, karena pada hakikatnya perceraian merupakan satu bagian yang menyatu dengan akad pernikahan.

Selain merusak tujuan syariat secara umum (*al-maqāṣid al-‘āmmah*), perceraian tanpa sebab dan tanpa ada dialog dengan istri bisa merusak tujuan syariat secara khusus (*al-maqāṣidal-khassah*). Sebagaimana dibahas sebelumnya, ada tujuh tujuan syariat dalam bab pernikahan menurut Jamaluddin Atiyyah,³⁷ di antaranya ada dua tujuan yang berkaitan langsung dengan problematika hukum talak tanpa sebab dan tanpa dialog, yaitu:

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memosisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.³⁸
2. Menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah*. Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri.³⁹

Dilihat dari tujuan pertama, maka syariat pernikahan merupakan salah satu cara Islam untuk merubah pola hubungan

³⁷ Bab pernikahan adalah salah satu bab dalam kajian fikih yang di dalamnya dibahas pembahasan-pembahasan spesifik seperti problematika perceraian. Oleh karena itu bab pernikahan masuk dalam kategori *al-maqāṣid al-khaṣṣah*.

³⁸ Ibid, 149.

³⁹ Ibid, 150.

laki-laki dan perempuan yang timpang sebelum Islam datang. Jika sebelum Islam datang perempuan diposisikan di tempat yang serendah-rendahnya, diposisikan sebagai objek hukum bukan subyek hukum, dan diposisikan di kelas kedua setelah laki-laki, maka hadirnya Islam berusaha merubah tata-tatanan timpang tersebut menuju pola hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih adil.

Jika dulu perempuan tidak punya hak waris bahkan menjadi objek waris, maka ketika Islam datang perempuan pun (baik sebagai anak, istri, maupun ibu) akhirnya mempunyai hak waris dan ada larangan perempuan dijadikan objek waris. Jika sebelum Islam datang ada kebiasaan bayi perempuan di kubur hidup-hidup karena dianggap sebagai beban atau untuk menghilangkan rasa malu, maka ketika Islam datang ada larangan mengubur bayi perempuan apapun alasannya.

Begitu juga ketika ada syariat pernikahan, maka syariat ini berusaha memperbaiki pola timpang yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan. Hadirnya syariat pernikahan dalam Islam memosisikan istri di tempat yang adil dan seimbang sejajar dengan suaminya. Oleh karena itu, dalam segala aspek aturan-aturan pernikahan, termasuk di dalamnya perceraian tidak boleh ada aturan yang timpang dan tidak adil gender. Suami dan istri punya hak yang sama untuk membangun rumah tangga menjadi lebih baik.

Perceraian tanpa sebab dan tanpa ada dialog dengan istri sungguh sangat merusak tujuan bab pernikahan itu sendiri. Kedatangan Islam untuk membangun keadilan bagi laki-laki dan perempuan, seakan runtuh dan hancur lebur dengan adanya otoritas suami yang begitu besar sehingga bisa menceraikan istrinya tanpa ada sebab yang melandasi dan tanpa ada ruang dialog dengan istri. Istri seakan kembali pada masa jahiliah, di mana keberadaannya dimarginalkan dan tidak dihargai.

Selain merusak tujuan tersebut, talak tanpa sebab dan tanpa ada dialog dengan istri juga akan merusak tujuan bab pernikahan berupa kebahagiaan (sakinah) yang menjadi idaman suami istri. Istri yang selama pernikahannya berusaha menjadi istri salihah dengan selalu memberikan yang terbaik untuk

suaminya, seakan sia-sia jika balasannya adalah ucapan cerai secara tiba-tiba, tanpa sebab, dan tidak ada ruang dialog di dalamnya. Tentu hal ini akan memberikan efek negatif yang luar biasa bagi seorang istri, dan menghancurkan bangunan “*sakinah*” yang menjadi tujuan pernikahan.

Terahir, perceraian tanpa sebab dan tanpa dialog akan merusak tujuan perceraian secara spesifik, yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada suami, atau istri, atau suami istri secara bersamaan.⁴⁰ Perceraian bukanlah hal main-main yang diobral bebas kapan saja mau diucapkan. Perceraian adalah solusi terahir ketipa opsi melanjutkan ikatan pernikahan tidak bisa ditempuh.

Menjaga ikatan pernikahan dalam keadaan normal (tidak ada konflik serius) seharusnya membawa kemaslahatan suami istri. Sebaliknya, perceraian dalam keadaan normal akan membawa kemudharatan. Ini adalah prinsip dasar yang tidak boleh dibalik. Jika keadaannya dibalik maka akan membawa dampak tidak baik. Oleh Karena itu, menjaga ikatan pernikahan dalam keadaan selalu ada konflik dan percekcoakan akut yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian, maka menjaga ikatan pernikahan justru akan menghasilkan kemudharatan bagi suami istri. Sebaliknya, perceraian dalam keadaan rumah tangga selalu ada konflik dan percekcoakan akut yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian, maka perceraian merupakan solusi terahir yang akan menghasilkan kemaslahatan.

Berdasar argumen dan rasionalisasi di atas, maka perceraian tanpa sebab dan tanpa ada diskusi dengan istri hukumnya haram dan pelakunya berdosa karena akan merusak tujuan syariat, baik tujuan syariat yang umum (*al-maqāṣid al'āmmah*), tujuan khusus (*al-maqāṣid al-khaṣṣah*), maupun tujuan spesifik (*al-maqāṣid al-juz'iyah*)

⁴⁰ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Ḥikmah al-Tashrī' wa Walsaftuhu*, juz 2 (Beirut; Dar al-Fikr, 1997), 36.

Penutup

Kaidah *maqāṣid al-sharīah* yang dijadikan landasar dasar ijtihad adalah 1) setiap aturan syariah pasti disandarkan pada tujuan (*maqāṣid*) dan kemaslahatannya, 2) Pencarian *maqāṣid* harus berdasarkan petunjuk dalil, 3) Hierarki *maslahah* dan *mafsadah*, dan 4) Perbedaan antara *al-maqāṣid* dan *al-Wasāil*

Penerapan kaidah *maqāṣid al-sharīah* dalam fikih perceraian masuk dalam tiga pembahasan, yaitu pemilik hak talak, syarat talak, dan hukum talak. Berdasar kaidah *maqāṣid al-sharīah*, bahwa pemilik hak talak adalah laki-laki sebagaimana dijelaskan oleh ulama fikih, akan tetapi talak tersebut bisa diucapkan berdasar putusan pengadilan agar hasilnya lebih objektif. Berdasar ini juga maka perempuan boleh mengajukan talak melalui si pengadilan agar hasilnya juga obyektif sesuai kemaslahatan suami istri.

Selanjutnya ada syarat tambahan pada talak selain syarat yang telah dijelaskan oleh fuqaha, yaitu syarat talak haruslah ada sebab-sebab tertentu yang mengharuskan ada perceraian, seperti sebab perselisihan terus menerus yang tidak bisa diselesaikan. Perceraian yang diucapkan tanpa ada sebab dan alasan yang jelas, dianggap batal dan tidak memenuhi syarat. Berdasar hal itu, perceraian tanpa sebab dan tanpa ada dialog dengan istri, hukumnya haram karena memberi dampak kemudahan khususnya kepada istri dan anak.

Daftar Pustaka

- 'Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali Rabi'ah, *'Ilmu Maqāṣid al-Shari'*. Riyad, Maktabah al-Abikan, 2010.
- 'Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fikih 'Ala al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2014.
- Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Ahmad al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqāṣidī, Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*. Ribat: al-Dār al-Baiḍa', 1999.
- Ali Ahmad al-Jurjawi. *Ḥikmah al-Tashrī' wa Falsafatuhu*. Beirut; Dār al-Fikr, 1997.

- Faqihuddin Abdul Qadir. *Qiraa'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Imam Kamaluddin, Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) dalam Prespektif Hukum Positif dan Fiqh Islam, Ijtihad, *Jurnah Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 13 Nomor 1, April 2019.
- Jamaluddin 'Atiyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid Sharī'ah*. Damaskus: Dar al-fikr, 2001.
- Muhammad Tahir bin 'Ashur. *Maqāṣid al-Sharīah al-Islāmiyah*. Urdun: Dār al-Nafāis, 2001.
- Muhyiddin al-Nawawi, *Kitāb al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab li al-Shirazī*, juz 18. Jeddah: Maktabah al-Isrsyad, tt..
- Mohsi, 'Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia', *Ulūmunā : Jurnal Studi Keislaman*. Vol.1 No.2 Desember 2015 : ISSN 2442-8566.
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, 'Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam hukum Perkawinan Islam', *SAWWA – Volume 8, Nomor 2, April 2013*.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 1. Kairo: al-Fathu li al-I'lam al-'arabī, tt.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Usrah al-Muslimah fi al-'Ālam al-Mu'aṣir*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'aṣir, 2010.